

## KAJIAN LITERATUR TENTANG KUALITAS INFORMASI KINERJA PADA SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Rieka Ramadhaniyah<sup>1</sup>, Fitri Agustina<sup>2</sup>, Saekarini Yuliachtri<sup>3</sup>, Nur Wahyu Ningsih<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup>IBI Darmajaya, Lampung

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah, Palembang

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan, Palembang

[ramdadhaniyah@darmajaya.ac.id](mailto:ramdadhaniyah@darmajaya.ac.id)\*, [fitriagustina86@gmail.com](mailto:fitriagustina86@gmail.com),  
[rinsaekarini@gmail.com](mailto:rinsaekarini@gmail.com), [nurwahyu@radenintan.ac.id](mailto:nurwahyu@radenintan.ac.id)

Received: 07-02-2026

Revised: 28-02-2026

Approved: 20-03-2026

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja (performance information quality) pada sektor publik di Indonesia serta merumuskan kerangka konseptual integratif berdasarkan kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan terstruktur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, menggunakan protokol PRISMA, serta bersumber dari artikel ilmiah bereputasi dalam rentang tahun 2018–2025 yang diperoleh dari database Scopus dan Google Scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan kualitas informasi kinerja dapat dikelompokkan ke dalam empat klaster utama, yaitu desain indikator dan proses verifikasi–validasi, kapasitas dan komitmen organisasi, tata kelola institusional/politik dan desain insentif, serta tata kelola data. Selain itu, ditemukan bahwa kualitas informasi kinerja masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rigiditas regulasi, rendahnya pembaruan indikator, serta potensi distorsi akibat tekanan target dan praktik gaming. Simpulan, bahwa kualitas informasi kinerja merupakan konstruk multidimensi yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks berbagai faktor, sehingga peningkatannya memerlukan pendekatan integratif melalui penguatan kapasitas organisasi, perbaikan sistem pengukuran kinerja, serta penguatan tata kelola data dan insentif yang selaras dengan tujuan akuntabilitas publik.*

**Kata Kunci:** Kualitas Informasi Kinerja, Sektor Publik, Akuntabilitas Publik

### PENDAHULUAN

Reformasi manajemen kinerja di sektor publik menempatkan informasi kinerja sebagai dasar akuntabilitas, pembelajaran organisasi, dan alokasi sumber daya, sehingga penggunaan informasi kinerja oleh manajer publik menjadi agenda riset yang mapan (Kroll 2015; Moynihan and Pandey 2010). Meskipun demikian, kualitas informasi kinerja sering dipertanyakan karena indikator dapat bias, sulit diverifikasi, atau tidak relevan terhadap tujuan kebijakan, sehingga menurunkan pemanfaatannya dalam keputusan anggaran maupun perbaikan layanan (Divorski & Scheirer, 2001; Schwartz & Mayne, 2005). Selain problem teknis, rezim target yang menekankan capaian numerik dapat memunculkan perilaku adaptif seperti gaming, yang menggeser perhatian dari tujuan substantif dan menurunkan validitas informasi kinerja (Bevan & Hood, 2006). Laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh instansi pemerintah dilakukan secara berkala (PANRB, 2021). Berikut data hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2022 – 2023.

Tabel 1.  
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Kategori Instansi	Rata-rata Nilai SAKIP 2022	Rata-rata Nilai SAKIP 2023	Selisih (Naik/Turun)
1	Pemerintah Provinsi	71,70	72,17	▲ 0,47
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	62,34	63,36	▲ 1,02

Tabel ini menunjukkan bahwa secara umum, kualitas implementasi SAKIP di Indonesia mengalami peningkatan, meskipun lambat. Pemerintah provinsi berada pada predikat Sangat Baik (BB) dengan nilai 72,17, sementara kabupaten/kota berada pada predikat Baik (B) dengan nilai 63,36. Kesenjangan kualitas antara provinsi dan kabupaten/kota masih lebar (8,81 poin), namun kabupaten/kota menunjukkan laju perbaikan yang lebih cepat (kenaikan 1,02 poin vs 0,47 poin), memberikan harapan terjadinya pemerataan kualitas di masa depan. Angka ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja di tingkat kabupaten/kota sudah terbangun, tetapi masih lemah. Rendahnya nilai tersebut merupakan dapat disebabkan dari beberapa faktor yang mempengaruhi pada pelaksanaan kinerja. Lemahnya faktor-faktor ini maka akan menghasilkan informasi kinerja yang berkualitas rendah.

Kualitas informasi kinerja (*performance information quality*) merujuk pada sejauh mana informasi yang dihasilkan memenuhi kriteria akurat, andal, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan (DeLone & McLean, 2016). Dalam konteks sektor publik, informasi kinerja yang berkualitas menjadi prasyarat bagi terwujudnya akuntabilitas publik yang bermakna (*meaningful accountability*). Tanpa informasi yang berkualitas, proses evaluasi kebijakan, penganggaran berbasis kinerja, dan pengawasan publik tidak dapat berjalan efektif (Kroll, 2015). Studi terdahulu tentang informasi kinerja di sektor publik lebih banyak berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi kinerja seperti penelitian (Kroll, 2015) yang mengidentifikasi faktor kepemimpinan, budaya organisasi, dan kematangan sistem pengukuran. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji determinan kualitas informasi kinerja masih terbatas, khususnya dalam konteks Indonesia. Kesenjangan konseptual antara dua tradisi tersebut menyebabkan studi-studi PIQ kerap terfragmentasi, sehingga determinan PIQ belum terpetakan secara integratif pada sektor publik (Kroll, 2015 ; Schwartz & Mayne, 2005).

Studi longitudinal terbaru pada Indonesia menunjukkan bahwa kualitas indikator dalam dokumen anggaran dapat berubah mengikuti tahapan reformasi, namun dibatasi oleh kapasitas dan aturan yang kaku, yang mengindikasikan pentingnya faktor kontekstual dan organisasi (van Thiel & Leeuw, 2002 ; Azam & Bouckaert, 2025). Karena itu, kajian literatur sistematis dibutuhkan untuk merumuskan peta determinan PIQ yang dapat menjadi dasar agenda riset dan rekomendasi kebijakan perbaikan pengukuran kinerja (Kroll, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah studi

empiris telah memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang kualitas informasi kinerja di sektor publik. Studi longitudinal (Azam & Bouckaert, 2025) di Indonesia menganalisis dokumen anggaran kementerian/lembaga periode 2011–2022 dan menemukan bahwa meskipun jumlah indikator kinerja terus bertambah seiring kemajuan reformasi, tingkat pembaruan (*renewal rates*) indikator justru rendah. Keterbatasan kapasitas dan aturan yang kaku membuat organisasi enggan mengubah atau memodifikasi indikator mereka secara signifikan untuk pengambilan keputusan anggaran. Studi ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia, sebagai tipikal negara berkembang, memiliki karakteristik khas berupa keterbatasan kapasitas, rendahnya keterlibatan stakeholder, informalitas tinggi, struktur hierarkis, dan praktik penganggaran inkremental yang kuat.

Penelitian (Simarmata, 2025) di Kota Bengkulu mengkaji pengaruh faktor rasional, politik, dan sosio-kultur terhadap pemanfaatan informasi kinerja. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun faktor politik tidak berpengaruh signifikan, faktor rasional (kapasitas teknis) dan sosio-kultur (budaya organisasi) berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi kinerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbaikan dalam aspek rasionalitas dan budaya organisasi dapat mendorong pemanfaatan informasi kinerja secara lebih optimal, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas publik instansi daerah. Kajian sistematis oleh (Pudjono et al., 2025) terhadap 122 studi tentang sistem manajemen kinerja di pemerintah lokal yang dipublikasikan antara tahun 2000 hingga 2023 mengungkapkan variasi tren di berbagai kawasan dunia. Amerika Utara menunjukkan kematangan PMS yang tinggi dengan fokus pada data kinerja dan keterlibatan publik. Eropa bervariasi dari *benchmarking* di Inggris hingga budaya organisasi di Italia. Studi di Asia berkonsentrasi pada kebijakan di China dan *benchmarking* di Malaysia, sementara pengembangan PMS di Afrika dan Amerika Selatan masih dalam tahap awal.

Sementara itu, (Mikael & Mabhungu, 2024) dalam kajian sistematisnya tentang praktik pelaporan kinerja di badan usaha milik negara (BUMN) menemukan bahwa pelaporan kinerja di entitas hybrid ini bersifat kompleks karena *hybridity of rationales* (fungsi ekonomi dan sosial), *heterogeneity of goals*, dan *multiple stakeholders' interest*. Keragaman kerangka kelembagaan dan struktur kepemilikan membuat pelaporan dan pengukuran kinerja di sektor ini lebih kompleks daripada di perusahaan swasta. Dalam skala global, meta-analisis yang dilakukan Meng dan Li (2025) terhadap 75 studi dengan 461 *effect size* mengungkapkan bahwa efek informasi kinerja terhadap stakeholder cenderung lebih kuat ketika informasi dikirim oleh pihak ketiga, diterima oleh warga, disampaikan dengan valensi positif, disajikan dalam bentuk absolut, dan disebarluaskan dalam sub-bidang administratif penegakan hukum serta dalam masyarakat dengan karakteristik *low power distance*. Pentingnya kualitas informasi kinerja juga terkait dengan kepercayaan publik. Penelitian eksperimen di Austria dan Jerman menemukan bahwa aksesibilitas data dan penyediaan sumber data meningkatkan kepercayaan warga terhadap informasi kinerja. Menariknya, warga memiliki kepercayaan lebih tinggi pada data yang disediakan pemerintah dibandingkan data yang disediakan warga lain, dan reputasi sumber memainkan peran dominan dalam membangun kepercayaan terhadap informasi kinerja (Parker et al., 2021 ; Schmidhuber et al., 2023).

Meskipun literatur tentang informasi kinerja di sektor publik telah berkembang pesat, masih terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan. *Pertama*, sebagian besar

studi berfokus pada penggunaan informasi kinerja (*performance information use*), bukan pada kualitas informasi itu sendiri. *Kedua*, belum ada sintesis komprehensif yang mengintegrasikan berbagai faktor determinan kualitas informasi kinerja dari berbagai konteks dan pendekatan teoretis. *Ketiga*, penelitian di negara berkembang—dengan karakteristik kapasitas terbatas, keterlibatan stakeholder rendah, informalitas tinggi, dan struktur hierarkis—masih terbatas, meskipun studi-studi terkini mulai mengisi kesenjangan ini (Azam & Bouckaert, 2025 ; Simarmata & Fachruzzaman, 2025). *Keempat*, kompleksitas pelaporan di entitas hybrid seperti BUMN masih belum banyak dieksplorasi secara memadai (Mikael & Mabhungu, 2024).

Pertanyaan riset kajian ini adalah: (1) bagaimana PIQ dikonsepsikan dan diukur dalam literatur; (2) faktor-faktor apa yang memengaruhi PIQ di sektor publik; dan (3) bagaimana mekanisme pengaruh faktor-faktor tersebut dapat dirangkum dalam kerangka integratif (Wang, 1996; Streib & Poister, 1999). Untuk mendukung keberhasilan upaya tersebut, diperlukan penelitian sistematis untuk menelaah secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja di sektor publik. Penelitian yang dilakukan merupakan *Systematic Literature Review (SLR)* yang dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, mengevaluasi, dan menafsirkan seluruh penelitian yang ada. Dengan demikian, fokus penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif melalui *Systematic Literature Review (SLR)* mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja di sektor publik.

## METODE PENELITIAN

Literature Review (SLR) adalah metode yang terstruktur dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis literatur yang relevan terkait dengan pertanyaan penelitian tertentu. Tujuan SLR adalah untuk memberikan sintesis yang menyeluruh dari hasil penelitian sebelumnya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu dan menemukan area penelitian yang perlu diperbaiki. Menurut Kitchenham et al (2007). Proses SLR terdiri dari tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Data yang digunakan bersifat sekunder dan dihimpun dari berbagai sumber akademik bereputasi, melalui pencarian berbasis web yang meniru pola kueri Google Scholar serta penelusuran lanjutan pada laman penerbit (mis. BMJ, OUP, Wiley, SAGE, ScienceDirect, ACM), dengan fokus pada publikasi dalam rentang waktu tujuh tahun terakhir (2018–2025). Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis di database Scopus dan Google Scholar.

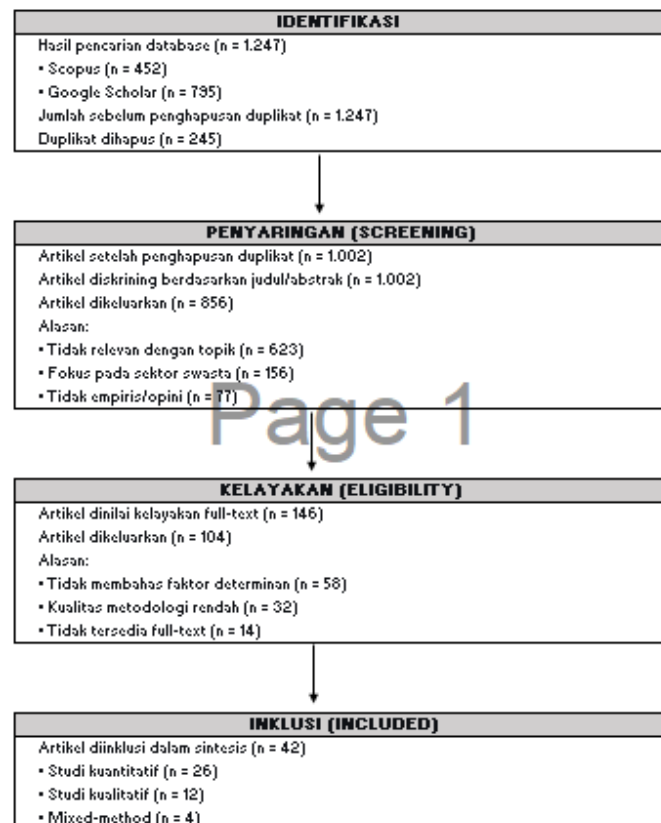
Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci: ("*performance information quality*" OR "*data quality*" OR "*information quality*") AND ("*public sector*" OR "*government*" OR "*public administration*") AND ("*factors*" OR "*determinants*" OR "*antecedents*"). Untuk konteks Indonesia, dilakukan pencarian tambahan dengan kata kunci: ("*kualitas informasi kinerja*" OR "*SAKIP*" OR "*E-SAKIP*") AND ("*sektor publik*" OR "*pemerintah*"). Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik (*thematic synthesis*) yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang disebutkan dalam literatur, kategorisasi tematik dengan mengelompokkan faktor-faktor ke dalam tema-tema utama, sintesis untuk mengembangkan kerangka konseptual integratif, serta penarikan kesimpulan secara deskriptif mengenai faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja di sektor publik. Kriteria Inklusi yaitu :

- 1) Artikel penelitian empiris (kuantitatif, kualitatif, mixed-method, atau systematic review)
- 2) Diterbitkan dalam jurnal ilmiah peer-review bereputasi internasional atau nasional terakreditasi
- 3) Fokus pada sektor publik (pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga publik, BUMN/layanan publik)
- 4) Membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja atau variabel terkait
- 5) Dipublikasikan dalam rentang 2018-2025
- 6) Tersedia dalam teks lengkap (*full text*)
- 7) Berbahasa Inggris atau Indonesia

**Kriteria Eksklusi:**

- 1) Artikel opini, editorial, buku, atau bab buku tanpa peer-review
- 2) Tidak tersedia teks lengkap
- 3) Fokus pada sektor swasta atau organisasi non-pemerintah
- 4) Tidak membahas faktor determinan secara spesifik
- 5) Duplikasi (artikel yang sama muncul di database berbeda)

Proses seleksi studi mengikuti protokol PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) 2020 yang terdiri atas empat tahap utama: identifikasi, penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi (*inclusion*).



**Gambar 1.** Diagram alur penelitian yang menggambarkan proses seleksi artikel

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sintesis tematik mengelompokkan determinan PIQ ke dalam empat kluster yang saling berinteraksi: (1) desain indikator dan proses verifikasi–validasi, (2) kapasitas dan komitmen organisasi, (3) tata kelola institusional/politik serta desain insentif, dan (4) tata kelola data dan manajemen informasi (Divorski & Scheirer, 2001). Kluster desain indikator menekankan perlunya definisi operasional, standar pengumpulan, serta mekanisme verifikasi dan validasi untuk menjamin data mendukung indikator secara tepat. Kluster kapasitas organisasi mencakup kompetensi SDM, dukungan pimpinan, dan orientasi pembelajaran yang memengaruhi produksi serta perbaikan informasi kinerja secara berkelanjutan (Kroll, 2015; Moynihan & Pandey, 2010).

Kluster tata kelola institusional/politik menjelaskan bagaimana aturan, tekanan eksternal, serta desain target dapat mendorong kepatuhan simbolik atau gaming yang merusak validitas dan legitimasi informasi kinerja (Bevan & Hood, 2006; Streib & Poister, 1999). Dalam konteks reformasi PBB, dinamika waktu dan tahapan reformasi berpengaruh terhadap tren kualitas indikator, namun keterbatasan kapasitas dan aturan yang rigid dapat menahan pembaruan indikator (Azam & Bouckaert, 2025). Kluster tata kelola data menempatkan data governance—meliputi peran, standar, kepemilikan data, serta mekanisme kontrol—sebagai prasyarat perbaikan kualitas data yang menopang informasi kinerja

**Tabel 2.**

### Klasifikasi Literature Review

Studi	Konteks	Konsep/ Dimensi PIQ	Determinan	Metode/Data	Temuan
Wang & Strong (1996)	Lintas industri (konseptual)	DQ/IQ multidimensi: akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, relevansi.	Konteks penggunaan & kebutuhan pengguna	Survei pengguna data dan konseptualisasi	Menekankan IQ/DQ sebagai konstruk berbasis konteks pengguna yang memandu perbaikan kualitas data.
Kahn et al. (2002)	Organisasi (konseptual/benchmark)	IQ sebagai produk & layanan; persepsi pengguna	Kualitas proses layanan informasi	Kerangka & benchmark (CACM)	Mendorong pengukuran IQ sebagai kombinasi kualitas data dan kualitas layanan penyediaan informasi.
Lee et al. (2002)	Organisasi (metodologi)	AIMQ: kategori dimensi IQ untuk assessment	Kematangan praktik assessment & feedback	Metodologi AIMQ (I&M)	Memberikan instrumen audit IQ yang dapat digunakan untuk identifikasi gap kualitas informasi.
Poister	Pemerintah kota	Kualitas/kemata	Dukungan	Survei praktik	Menunjukkan

Studi	Konteks	Konsep/ Dimensi PIQ	Determinan	Metode/Data	Temuan
& Streib (1999)	(AS)	ngan pengukuran kinerja (terkait validitas & kegunaan)	manajerial, kapasitas, tekanan eksternal	pengukuran kinerja	variasi kematangan PMS dan pentingnya kapasitas serta dukungan untuk menghasilkan ukuran yang berguna.
Streib & Poister (1999)	Pemerintah kota (AS)	Validitas-legitimasi-fungsionalitas	Keterlibatan pemangku kepentingan, desain ukuran, kapasitas implementasi	Survei ke kota >25.000 penduduk	Mengidentifikasi kelemahan pada validitas, legitimasi, dan fungsionalitas, serta area peningkatan pada desain dan penerimaan ukuran.
Bevan & Hood (2006)	Kesehatan publik Inggris	publik Kualitas informasi kinerja terancam oleh distorsi target	Insentif target, tekanan akuntabilitas, gaming	Analisis kebijakan & bukti empiris sektor kesehatan	Menunjukkan 'targets and gaming' dapat menggeser indikator dari tujuan substantif dan merusak validitas informasi.
Moynihan & Pandey (2010)	Manajer publik (AS)	Kualitas informasi kinerja sebagai prasyarat use	Kapasitas analitik, budaya organisasi, dukungan pimpinan	Survei manajer publik (JPART)	Menjelaskan faktor organisasi yang memengaruhi penggunaan informasi kinerja, termasuk isu kualitas dan ketersediaannya.
Kroll (2015)	Lintas studi sektor publik	Kualitas sistem pengukuran memengaruhi penggunaan	Kepemimpinan, kultur, tujuan penggunaan, desain PMS	Tinjauan literatur sistematis (PPMR)	Merangkum determinan penggunaan informasi kinerja dan menempatkan kualitas PMS sebagai faktor kunci.
Speklé	Organisasi sektor	Kualitas PMS	Desain PMS	Studi empiris	Menunjukkan

Studi	Konteks	Konsep/ Dimensi PIQ	Determinan	Metode/Data	Temuan
& Verbeeten (2014)	publik	terkait efek terhadap kinerja	(enabling vs coercive), penggunaan manajerial	(MAR)	desain PMS dan cara penggunaan memengaruhi hasil, sehingga kualitas dan desain pengukuran menjadi krusial.
Divorski & Scheirer (2001)	Agen federal AS	Kualitas data performa: verifikasi (akurat/tepat waktu/konsisten) & validasi (sesuai ukuran)	Komitmen & kapasitas DQ, assessment, respons terhadap keterbatasan, <i>build-in quality</i>	Studi GAO pada 6 agensi (Eval & Program Planning)	Menyediakan kerangka 4 pendekatan untuk meningkatkan kualitas data performa melalui V&V dan kapasitas organisasi.
Schwartz & Mayne (2005)	Multi-negara & organisasi	& <i>Quality assurance evaluative information:</i> reliabilitas, validitas, kredibilitas, legitimasi, fungsionalitas, <i>timeliness</i> , relevansi	Lingkungan politik/organisasi, standar, independensi, proses QA	Studi komparatif/praktik QA (Eval & Program Planning)	Menekankan bahwa QA dipengaruhi politik/organisasi dan perlu desain proses QA untuk mencegah 'illusion of QA'.
Azam & Bouckaert (2024)	Reformasi Indonesia (2011-2022)	PBB (2011-2022) Kualitas indikator melalui tren & renewal rate; pergeseran ke indikator hasil	Tahap reformasi, kompleksitas organisasi, aturan rigid, kapasitas	Analisis longitudinal dokumen anggaran (JPBAFM)	Menunjukkan perbaikan bertahap namun renewal rendah; kapasitas dan aturan kaku menghambat pembaruan indikator dan peningkatan kualitas.

Kualitas informasi kinerja di sektor publik harus dimulai dengan pemahaman bahwa konsep ini bersifat multidimensi dan sangat bergantung pada konteks pengguna. Studi foundational (Wang, 1996) menetapkan landasan konseptual bahwa kualitas data tidak dapat didefinisikan secara tunggal, melainkan terdiri atas berbagai dimensi seperti akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu, relevansi, aksesibilitas, reputasi, dan interpretabilitas. (Kahn et al., 2002) memperluas pemahaman ini dengan membedakan kualitas informasi sebagai produk dan sebagai layanan, di mana sebagai produk informasi harus bebas dari kesalahan dan disajikan secara ringkas, sementara sebagai

layanan informasi harus relevan, dapat diakses, dan memiliki reputasi yang baik. (Lee et al., 2002) melengkapi fondasi konseptual ini dengan mengembangkan instrumen AIMQ yang mengkategorikan dimensi kualitas informasi ke dalam empat kelompok, yaitu sound information, dependable information, useful information, dan usable information. Dalam konteks sektor publik, pemahaman multidimensi ini sangat relevan karena informasi kinerja digunakan oleh beragam pemangku kepentingan dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga kualitas informasi kinerja tidak dapat dinilai dengan satu ukuran universal, tetapi harus dievaluasi dari berbagai perspektif pengguna.

Salah satu temuan paling konsisten dari literatur adalah pentingnya faktor organisasional dan kepemimpinan dalam mempengaruhi kualitas informasi kinerja. (Poister & Streib, 2014) dalam studi mereka terhadap 295 kota di Amerika Serikat menemukan bahwa variasi kematangan performance measurement system sangat ditentukan oleh tiga faktor, yaitu dukungan manajerial, kapasitas organisasi, dan tekanan eksternal. Memperdalam temuan ini dengan mengidentifikasi tiga dimensi kualitas yang sering menjadi kelemahan, yaitu validitas, legitimasi, dan fungsionalitas, di mana keterlibatan pemangku kepentingan dalam desain ukuran kinerja menjadi faktor kunci untuk mengatasi kelemahan tersebut. Moynihan & Pandey (2010) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa budaya organisasi yang fleksibel dan kapasitas analitik merupakan faktor penting yang mempengaruhi penggunaan informasi kinerja, di mana organisasi dengan budaya yang mendukung pembelajaran dan inovasi cenderung lebih mampu menghasilkan dan menggunakan informasi kinerja yang berkualitas. Kroll (2015)) dalam tinjauan literatur sistematisnya menempatkan kualitas sistem pengukuran kinerja sebagai faktor kunci, namun menekankan bahwa kualitas saja tidak cukup tanpa didukung oleh kepemimpinan dan budaya organisasi yang mendukung. Vidè et al (2025) memberikan kontribusi penting dengan pendekatan fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis yang menemukan bahwa kejelasan tujuan merupakan kondisi yang diperlukan namun tidak cukup untuk penggunaan informasi kinerja yang bertujuan, di mana kejelasan tujuan perlu dilengkapi oleh salah satu dari dua konfigurasi, yaitu sistem manajemen kinerja yang matang dipadukan dengan manajer yang memiliki motivasi prososial dan terlibat dalam perilaku extra-role, atau budaya organisasi yang berkembang yang mampu memotivasi manajer yang kurang menyadari dampak sosial dari pekerjaan mereka.

Faktor kapasitas sumber daya manusia muncul sebagai determinan kritis dalam berbagai studi. Divorski & Scheirer (2001) dalam studi mereka terhadap enam agensi federal AS mengembangkan kerangka empat pendekatan untuk meningkatkan kualitas data performa, yaitu verifikasi data untuk memastikan akurasi, ketepatan waktu, dan konsistensi, validasi data untuk memastikan ukuran benar-benar mencerminkan konsep yang dimaksud, respons organisasi terhadap keterbatasan data, dan membangun kualitas sejak awal. Azam & Bouckaert (2025) dalam studi longitudinal mereka terhadap 85 kementerian atau lembaga di Indonesia selama periode 2011 hingga 2022 menemukan bahwa meskipun terjadi pergeseran bertahap menuju indikator yang lebih berorientasi hasil, tingkat pembaruan indikator justru rendah akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan aturan yang kaku. Indonesia sebagai tipikal negara berkembang memiliki karakteristik khas berupa keterbatasan kapasitas, rendahnya keterlibatan stakeholder, informalitas tinggi, struktur hierarkis, dan praktik penganggaran inkremental yang kuat. (Haliah et al., 2021) mengidentifikasi tiga faktor determinan kualitas laporan keuangan dan kinerja pemerintah di Sulawesi

Selatan, yaitu faktor personal yang meliputi kompetensi sumber daya manusia, faktor sistem atau administrasi yang meliputi regulasi, dan faktor politik, di mana kualitas laporan keuangan memediasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja pemerintah.

Salah satu kontribusi penting dalam literatur adalah identifikasi ancaman terhadap kualitas informasi yang berasal dari sistem insentif dan tekanan akuntabilitas. (Bevan & Hood, 2006) dalam studi mereka tentang sistem target di sektor kesehatan Inggris memperkenalkan konsep *hitting the target but missing the point*, di mana ketika target dikaitkan dengan insentif yang kuat, organisasi cenderung melakukan *gaming* atau perilaku manipulatif yang membuat target tercapai secara administratif tetapi tujuan substantif layanan tidak tercapai. (Grøn & Kristiansen, 2022) memperluas diskusi ini dengan menekankan pentingnya *quality assurance* dalam informasi evaluatif, di mana mereka mengidentifikasi dimensi kualitas yang perlu dijamin meliputi reliabilitas, validitas, kredibilitas, legitimasi, fungsionalitas, ketepatan waktu, dan relevansi, namun juga memperingatkan tentang risiko *illusion of QA* ketika proses *quality assurance* dijalankan secara formal tetapi tidak substantif. Dalam konteks Indonesia, Adi et al., (2016) menemukan bahwa kualitas pengungkapan laporan kinerja pemerintah daerah di website hanya mencapai 35,46 persen dari informasi yang seharusnya disampaikan, dengan penyebab utama berupa tidak adanya standar pengungkapan yang jelas, minimnya penggunaan grafik dan tabel untuk memudahkan interpretasi, serta penyajian yang tidak sistematis.

Literatur terkini menunjukkan bahwa kompleksitas organisasi dan konteks kelembagaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas informasi kinerja. (Grøn & Kristiansen, 2022) dalam studi mereka terhadap 2.298 manajer publik di Denmark menemukan adanya kesenjangan eselon dalam penggunaan informasi kinerja, di mana manajer puncak menggunakan informasi kinerja lebih banyak dibandingkan eselon bawah, sehingga sistem manajemen kinerja perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan pengguna di berbagai tingkatan. (Mikael & Mahungu, 2024) menyoroti kompleksitas pelaporan kinerja di entitas hybrid seperti BUMN yang memiliki karakteristik unik berupa *hybridity of rationales, heterogeneity of goals, dan multiple stakeholders' interest*, sehingga kerangka pelaporan kinerja perlu mengintegrasikan tiga pilar yaitu *stakeholders, performance measurements, dan the quality of the information*. De Matteis & Borgonovi (2024) mengidentifikasi tiga risiko potensial dalam pengembangan model *performance governance* di sektor kesehatan publik Italia, yaitu *rigidity in performance measurement tool, organization-objective-responsibility relationship, dan participatory illusion*, yang mengingatkan bahwa upaya peningkatan kualitas informasi kinerja tidak boleh terjebak pada formalisme dan kekakuan alat ukur.

Salah satu kemajuan teoretis penting dalam literatur terkini adalah pengakuan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja tidak bekerja secara terpisah, melainkan berinteraksi dalam konfigurasi yang kompleks. Temuan (Vidè et al., 2025) bahwa kejelasan tujuan merupakan kondisi yang diperlukan namun tidak cukup memiliki implikasi penting bahwa tanpa kejelasan tujuan mustahil mencapai kualitas informasi yang tinggi, namun kejelasan tujuan saja tidak menjamin kualitas karena perlu dikombinasikan dengan faktor lain melalui dua jalur alternatif, yaitu jalur motivasi prososial di mana organisasi dengan sistem manajemen kinerja yang matang dan manajer yang memiliki motivasi prososial serta terlibat dalam perilaku *extra-role*

dapat mencapai kualitas informasi yang tinggi bahkan dalam budaya organisasi yang tidak inovatif, serta jalur budaya organisasi di mana organisasi dengan budaya yang berkembang dapat memotivasi manajer yang kurang menyadari dampak sosial dari pekerjaan mereka untuk tetap menghasilkan dan menggunakan informasi kinerja yang berkualitas. Temuan ini menjelaskan heterogenitas hasil di berbagai organisasi dan berimplikasi bahwa intervensi peningkatan kualitas informasi kinerja harus dirancang berdasarkan diagnosis konfigurasi faktor yang ada di masing-masing organisasi.

Temuan-temuan dalam literatur ini memiliki relevansi kuat untuk konteks Indonesia dan negara berkembang pada umumnya. (Azam & Bouckaert, 2025) secara spesifik meneliti Indonesia dan mengidentifikasi karakteristik khas yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja berupa keterbatasan kapasitas, rendahnya keterlibatan stakeholder, informalitas tinggi, struktur hierarkis, dan praktik penganggaran inkremental yang kuat, yang menjelaskan mengapa tingkat pembaruan indikator rendah dan peningkatan kuantitas indikator tidak selalu diiringi peningkatan kualitas. (Nirwana & Haliah, 2018) mengkonfirmasi pentingnya faktor personal, sistem atau administrasi, dan politik dalam konteks Indonesia, di mana kualitas laporan keuangan memediasi pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kinerja pemerintah. Adi et al., (2016) mengungkapkan kelemahan spesifik dalam pengungkapan informasi kinerja di website pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa selain masalah produksi informasi, ada juga masalah diseminasi informasi di mana informasi yang berkualitas sekalipun tidak akan bermanfaat jika tidak diakses oleh publik. Berdasarkan sintesis temuan, dapat disusun model konseptual integratif yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi kinerja di sektor publik meliputi level lingkungan eksternal dengan faktor regulasi, tekanan politik, tekanan publik, dan konteks negara, level organisasional makro dengan faktor kejelasan tujuan, budaya organisasi, kompleksitas organisasi, dan struktur tata kelola, level kapasitas dan sumber daya dengan faktor kompetensi sumber daya manusia, kapasitas analitik, motivasi prososial manajer, dan kesenjangan eselon, level sistem pengukuran dengan faktor kematangan sistem manajemen kinerja, desain indikator, tingkat pembaruan indikator, serta verifikasi dan validasi data, level kualitas informasi kinerja dengan dimensi akurasi, reliabilitas, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan, konsistensi, dan keterauditan, serta ancaman dan risiko berupa *gaming* dan *distorsi target*, *illusion of quality assurance*, *rigidity alat ukur*, dan *participatory illusion*.

## KESIMPULAN

Bahwa kualitas informasi kinerja di sektor publik Indonesia merupakan konstruk multidimensi yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor desain indikator, kapasitas dan komitmen organisasi, tata kelola institusional/politik, serta tata kelola data. Meskipun reformasi seperti SAKIP menunjukkan adanya perbaikan bertahap, kualitas informasi kinerja masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rigiditas regulasi, rendahnya pembaruan indikator, serta potensi distorsi akibat tekanan target dan praktik gaming. Selain itu, faktor kepemimpinan, budaya organisasi yang mendukung pembelajaran, serta sistem verifikasi dan validasi data yang kuat terbukti menjadi prasyarat penting dalam menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas informasi kinerja tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan integratif yang memperkuat kapasitas organisasi,

memperbaiki desain sistem pengukuran, serta memastikan tata kelola data dan insentif yang selaras dengan tujuan substantif akuntabilitas publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, S., Martani, D., Pamungkas, B., & Simanjuntak, R. A. (2016). Analysis of the quality of performance report of the local government on websites: Indonesian case. *Cogent Business and Management*, 3(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2016.1229393>
- Azam, M., & Bouckaert, G. (2025). Performance-based budgeting reform and evolution of performance information quality: empirical analysis of Indonesia. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 37(1), 25–47. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-12-2023-0223>
- Bevan, G., & Hood, C. (2006). What's measured is what matters: Targets and gaming in the English public health care system. *Public Administration*, 84(3), 517–538. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2006.00600.x>
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2016). Information Systems Success Measurement. *Foundations and Trends® in Information Systems*, 2(1), 1–116. <https://doi.org/10.1561/2900000005>
- Divorski, S., & Scheirer, M. A. (2001). Improving data quality for performance measures: Results from a GAO study of verification and validation. *Evaluation and Program Planning*, 24(1), 83–94. [https://doi.org/10.1016/S0149-7189\(00\)00049-5](https://doi.org/10.1016/S0149-7189(00)00049-5)
- Grøn, C. H., & Kristiansen, M. B. (2022). What Gets Measured Gets Managed? The Use of Performance Information across Organizational Echelons in the Public Sector. *Public Performance and Management Review*, 45(2), 448–472. <https://doi.org/10.1080/15309576.2022.2045615>
- Haliah, D., Nirwana, S., & Akhzan, F. H. (2021). Role of Performance Audit in Public Sector Organization. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3743077>
- Kahn, B. K., Strong, D. M., & Wang, R. Y. (2002). Information Quality Benchmarks: Product and Service Performance. *Communications of the ACM*, 45(4), 184–192. <https://doi.org/10.1145/505248.506007>
- Kroll, A. (2015). Drivers of performance information use: Systematic literature review and directions for future research. *Public Performance and Management Review*, 38(3), 459–486. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1006469>
- Lee, Y. W., Strong, D. M., Kahn, B. K., & Wang, R. Y. (2002). AIMQ: A methodology for information quality assessment. *Information and Management*, 40(2), 133–146. [https://doi.org/10.1016/S0378-7206\(02\)00043-5](https://doi.org/10.1016/S0378-7206(02)00043-5)
- Mikael, T. L., & Mabhungu, I. (2024). Performance reporting practices in state-owned enterprises: A systematic literature review. *Africa's Public Service Delivery & Performance Review*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v12i1.866>
- Moynihan, D. P., & Pandey, S. K. (2010). The big question for performance management: Why do managers use performance information? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 20(4), 849–866. <https://doi.org/10.1093/jopart/muq004>
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant factor of the quality of financial statements and performance of the government by adding contextual factors: Personal factor, system/administrative factor. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>

- Parker, L. D., Schmitz, J., & Jacobs, K. (2021). Auditor and auditee engagement with public sector performance audit: An institutional logics perspective. *Financial Accountability and Management*, 37(2), 142–162. <https://doi.org/10.1111/faam.12243>
- Poister, T. H., & Streib, G. (2014). Performance measurement in municipal government: Assessing the state of the practice. *Performance Measurement: Building Theory, Improving Practice: Building Theory, Improving Practice*, 59(4), 146–162. <https://doi.org/10.2307/3110115>
- Pudjono, A. N. S., Wibisono, D., & Fatima, I. (2025). Advancing local governance: a systematic review of performance management systems. *Cogent Business and Management*, 12(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2442545>
- Schwartz, R., & Mayne, J. (2005). Assuring the quality of evaluative information: Theory and practice. *Evaluation and Program Planning*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2004.10.001>
- van Thiel, S., & Leeuw, F. L. (2002). The Performance Paradox in the Public Sector. *Public Performance & Management Review*, 25(3), 267–281. <https://doi.org/10.1080/15309576.2002.11643661>
- Vanhengel, S., George, B., Letens, G., & Verweire, K. (2026). The organizational change capability of public organizations: Concept and measurement. *Public Money and Management*, 46(1), 112–123. <https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2506732>
- Vidè, F., Cepiku, D., & Mastrodascio, M. (2025). Performance management in action: a configurational analysis of the drivers of the purposeful use of performance information. *International Journal of Public Sector Management*, 38(2), 277–295. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2024-0021>
- Wang, R. Y. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5–34. <https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099>